



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2023 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024 perlu diterjemahkan lebih rinci ke dalam rencana aksi tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pemukhtahiran dari Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2023 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024 dengan penyesuaian sebagai berikut :
- a. Permasalahan;
 - b. Sasaran;
 - c. Indikator dan Target;
 - d. Rencana Aksi;
 - e. Indikator Rencana Aksi dan Target; dan
 - f. Penganggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

PEMUKHTAHIRAN TARGET KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI GENERAL
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	2023	Proyeksi Realisasi Tahun 2023	Target 2024 Sesuai Perwali 114 Tahun 2023	Perubahan Target Tahun 2024	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	90,56%	90,56%	90,56	90,56	90,56	
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	n/a	-	2	100%	100%	
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3.31 (Baik)	3,4 (Baik)	4 (Sangat Baik)	3,5 (Sangat Baik)	4,20 (Sangat Baik)	
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	71.20 (BB)	75 (BB)	72,73	82 (A)	Tetap	

	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	2023	Proyeksi Realisasi Tahun 2023	Target 2024 Sesuai Perwali 114 Tahun 2023	Perubahan Target Tahun 2024
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Implementasi pelayanan publik digital	n.a	1 MPP Digital	belum	1	Tetap
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah unit kerja yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi	2	3	0,5 (3)	4	3
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	3	3	3,16	3	3,20
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut Laporan SP4N Lapor	90%	100%	belum	100%	Tetap
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas Internal oleh KPK	79,84	79,93	76,23	80,00	78
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	n.a	75	54,72	75	tetap
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	n.a	75 (baik)	54,10	75 (Baik)	tetap
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawas Kearsipan	48,88	55	61,70	60	70
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,33 (Cukup)	2,6 (Baik)	2,36 (cukup)	2,7 (Baik)	Tetap
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	68,7	72	73,90 (kondisi November)	73	74

	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	2023	Proyeksi Realisasi Tahun 2023	Target 2024 Sesuai Perwali 114 Tahun 2023	Perubahan Target Tahun 2024						
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	5 (WTP)	WTP	Tetap						
			Persentase Temuan BPK yang telah ditindaklanjuti	60%	75%	79,80%	90%	Tetap						
SS. 2 : Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	n.a	175	123,50	250	Tetap						
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN												
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN												
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks BerAKHLAK	62	75	63	75	Tetap						
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN												
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima							Indeks Pelayanan Publik	4,52	4,75	4,27	5	Tetap
									Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	69,63	86,92	88,01	90,38	Tetap
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,64	89	belum	90	Tetap							

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

PEMUKHTAHIRAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SS.1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel

S.1. Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Kegiatan Utama : Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
SS. 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel																		
1.	Penyusunan Kebutuhan Jabatan pada Peta Jabatan berdasarkan Anjab dan ABK dan Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional dari masing-masing Instansi Pembina	Selesai		Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Jabatan pada 32 Perangkat Daerah	32												
2.		Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Penyesuaian dokumen tugas dan fungsi sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Dokumen	Rancangan perwali tentang tugas dan fungsi perangkat daerah							5	41.093.000	5	Rp 41.093.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD	

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator		TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2.	Melaksanakan internalisasi kebijakan sistem kerja baru	Tetap	melakukan kunjungan kerja ke unit kerja untuk dilakukan internalisasi tentang sistem kerja baru	SKPD	Jumlah unit kerja yang dilakukan internalisasi / Coaching Clinic		24	0	8					33	n.a	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
3.	Melaksanakan penyesuaian proses bisnis dengan sistem kerja baru	Tetap	menyusun proses bisnis yang disesuaikan dengan sistem kerja baru	Dokumen	Jumlah dokumen Proses Bisnis yang disesuaikan						33	20.850.000,00		33	20.850.000,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
4.	Melaksanakan monitoring sistem kerja baru	Tetap	melakukan monitoring terhadap implementasi sistem kerja baru di unit kerja	Dokumen Laporan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi sistem kerja baru								1	0	1	n.a	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	BKD dan Inspektorat

SS1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
 S3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional
 Kegiatan Utama : Pelaksanaan Arsitektur Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1.	Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Tetap	Tim koordinasi SPBE melaksanakan rapat untuk mengecek kesesuaian dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE dengan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan praktik terbaik yang berlaku	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	0	0	0	2	2.750.000	1	1.375.000	0	0	3	4.125.000	Diskominfo	Seluruh SKPD

**SS1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
S4 Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Kegiatan Utama : Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.	Reviu dan Asistensi Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	Tetap	Dokumen perencanaan SKPD yang sinergis dengan Dokumen Perencanaan Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen yang di verif sesuai hasil asistensi	0	0		32			0		0		32	Bappeda Litbang	
2.	Melaksanakan pengembangan sistem perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terintegrasi		Penyusunan proses bisnis pengembangan aplikasi kayuh baimbai terintegrasi	Dokumen	Penyusunan proses bisnis pengembangan aplikasi kayuh baimbai terintegrasi	n.a	1		0								Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
			Pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi pemerintah Kota Banjarmasin	Kegiatan	Pengembangan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi	n.a	1		0									
			Sosialisasi ke SKPD terkait Implementasi Sistem Kayuh Baimbai	Kegiatan	Sosialisasi dan implementasi sistem	n.a	1		0									

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator		TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3.		Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Kota Banjarmasin	1.Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan Kinerja di SKPD 2.Memberikan Pendampingan dan Masukan Kepada SKPD terkait Implentasi SAKIP 3.Memberikan Pendampingan dan Masukan Kepada SKPD Rencana Aksi RB 4.Menyiapkan Data-data terkait Implementasi SAKIP di Level Kota 5.Menjamin kesesuaian Eviden dari SKPD	SK	Surat Keputusan Tim Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Kota Banjarmasin	n.a	1							1		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota Tim Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Kota Banjarmasin	
4.		Pemanfaatan Aplikasi Kayuh Baimbai	dalam penyusunan PK dan melaporkan Evaluasi Pelaksanaan/ RFK sudah sepenuhnya memanfaatkan Sistem, dan tidak di	persen	Persentase Pemanfaatan aplikasi Kayuh Baimbai dalam menyusun Perjanjian Kinerja oleh SKPD	n.a	100	2.200.000						100	2.200.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1. Bappeda Litbang 2. Inspektorat 3. Bagian Pembangunan	

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			perkenankan lagi SKPD untuk menyusun PK dengan cetak dokumen, cetak yang sudah teranggarkan akan di hitung efisiensi	Persen	Persentase Pemanfaatan aplikasi Kayuh Baimbai dalam melaporkan RFK Oleh SKPD	n.a	100	-	-	-	-	-	-	100				
				Surat Edaran	Menerbitkan Surat Edaran terkait Mekanisme Penyusunan PK melalui Aplikasi Kayuh Baimbai	n.a	1	-	-	-	-	-	-	1				
5.		Melakukan Coaching Clinic ke SKPD	Melakukan kunjungan ke SKPD memberikan masukan terhadap Perencanaan Kinerja dan Laporan Kinerja	Dokumen	Perbaikan Pohon Kinerja	n.a	32	-	-	-	-	-	-	32	35.200.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1. Bappeda Litbang 2. Inspektorat	
				Dokumen	Perbaikan Dokumen IKU SKPD	n.a	-	-	-	32	-	-	-	32				
				Dokumen	Perbaikan Dokumen Renstra SKPD	n.a	-	-	-	32	-	-	-	32				
				Dokumen	Dokumen Lkj SKPD yang berkualitas dan Tepat Waktu	n.a	32	-	-	-	-	-	-	32				
6.	Melaksanakan peningkatan kompetensi penyusun laporan kinerja	Tetap		Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi	1	-	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD			

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
7.	Melaksanakan Peningkatan kompetensi evaluator internal	Tetap	Melaksanakan Peningkatan kompetensi evaluator internal yang melakukan Evaluasi LAKIP SKPD	Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi evaluator		0	0	1	7.950.000	0	0	0	0	1	7.950.000	Inspektorat	APIP

SS1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
S5 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)
Kegiatan Utama : Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.	Menyediakan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi antar dinas teknis	Pengembangan Aplikasi SALAM RINDU		Program	Ketersediaan program aplikasi yang memudahkan proses pelayanan publik		1		0		0		0		1	0	Diskominfotik	Seluruh SKPD
			Penambahan Modul Fasilitas Ijin non berusaha pada aplikasi SALAM RINDU	Modul fasilitas	Jumlah modul Fasilitas Ijin Non Berusaha	n.a	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	DPMPPTSP	Diskom infotik

SS1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
 S6 Meningkatkan Kualitas Pengawasan

- Kegiatan Utama : 1. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
 2. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 3. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
 4. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1.	Melakukan pendampingan ke SKPD yang diusulkan sebagai SKPD menuju WBK/WBBM	Tetap	Pendampingan dari Inspektorat dan TPI kepada SKPD yang diusulkan menuju WBK/WBBM	Laporan	Laporan Pendampingan ZI	1	0		0		1	22.275.000	0		1	22.275.000	Inspektorat	Seluruh SKPD		
				SK	SK TPI ZI	1	0		1	0	0		0		1	-	Inspektorat	SKPD Terkait		
2.	Membangun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua SKPD	Tetap	Melakukan Pengendalian Internal (SPIP) oleh masing-masing asesor SKPD	Laporan	Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP, Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP		0		0		2	0	0		2	78.800.000	Inspektorat	Seluruh SKPD		
				SK	SK Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Banjarmasin	0	1		0		0		0		0		1	0	Bappedalitbang	Seluruh SKPD
				SE	Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahunan	0	1		0		0		0		0		1	0	Bappedalitbang	Seluruh SKPD

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3.	Sosialisasi di SP4N-LAPOR kelurahan dan sekolah, Bamara (Badapatan Menyambung Silaturahmi) ke kampus dan Bimtek Bagi Admin Laport SKPD	Tetap	Melakukan sosialisasi SP4N-LAPORA dengan sasaran sekolah-sekolah	Program	Jumlah program kegiatan yang diintegrasikan		2		2		2		5			Diskominfotik	Seluruh SKPD	
4.		Terbentuknya Call Center 112	Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan/atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah	Layanan Panggilan Darurat	Tersedianya Layanan Nomor Panggilan Darurat dalam satu nomor	n.a	1	Rp. 49.500.000	0	Rp. 49.500.000	0	Rp. 49.500.000	0	Rp. 49.500.000	1	Rp. 198.000.000	Diskominfotik	Seluruh SKPD
5.	Monev dan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas	Tetap	Melakukan Monev dan Sosialisasi hasil Tindak Lanjut dari Survei Penilaian Integritas KPK	Laporan	Jumlah Laporan Monev dan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas		0		0		1	22.275.000	0		1	22.275.000	Inspektorat	Seluruh SKPD

SS1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
S7 Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Kegiatan Utama : 1. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
2. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.	Pembentukan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Tetap	Membentuk Tim internal terkait pengukuran indeks kualitas kebijakan	Jumlah	Jumlah Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan		-		-		1 Keputusan Wali Kota		-		1 Keputusan Wali Kota		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2.	Identifikasi Produk Hukum yang Diukur Berdasarkan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Tetap	Melakukan identifikasi produk hukum	Jumlah	Jumlah Produk Hukum yang Diukur Berdasarkan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan		-		-		1 Perda 1 Perwali		-		1 Perda 1 Perwali		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial
3.	Pengharmonisan Rancangan Produk Hukum Daerah dengan Instansi yang Berwenang	Tetap	Melakukan Harmonisasi produk hukum Rancangan perda Inisiatif KDH/Perwal dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD dengan instansi yang berwenang	Jumlah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan instansi yang Berwenang		2 Produk Hukum Daerah	-	2 Produk Hukum Daerah	-	2 Produk Hukum Daerah	-	2 Produk Hukum Daerah	-	8 Produk Hukum Daerah		Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, SKPD Pemrakarsa dan Kemenkumham Kal-Sel	Kemenkumham Kal-Sel

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
4.	Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafter) yang berkualitas	Tetap	Mengikuti peningkatan Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafter) yang berkualitas	Jumlah	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafter) yang ditugaskan mengikuti pelatihan/bimtek		-	-	-	-	1	-	1	-	2 Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafter) yang ditugaskan mengikuti pelatihan/bimtek	-	BKD, Diklat	BPSDM Hukum dan Ham Kemenkumham Pusat
5.	Melaksanakan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Tetap	Evaluasi Produk Hukum	Jumlah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Telah Selesai Dievaluasi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-		2 Produk Hukum Daerah		1 Produk Hukum Daerah		1 Produk Hukum Daerah		4 Produk Hukum Daerah		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6.	Melaksanakan Pengelolaan JDIH yang sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum	Tetap	Mengelolaan JDIH yang sesuai standar	Persen	Persentase terkelolanya JDIH yang sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

SS1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
 S8 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral

Kegiatan Utama : 1.Pelaksanaan Arsip Digital
 2.Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.	Melaksanakan Alih Media dari Konvensional V ke Digital	Tetap	Proses digitalisasi arsip konvensional ke arsip digital/elektronik	Berkas	Jumlah Data yang telah dialihkan ke digital	100	2.000		2.000	16.814.400	3.0000	49.249.200	-	-	7.0000	66.063.600	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Seluruh SKPD
2.	Kebijakan kearsipan	Tetap	Penyusunan Perwali Kota Bjm tentang JRA Pemerintah Kota Bjm	Jumlah	Jumlah kebijakan kearsipan yang telah dikeluarkan	6 Perwali dan 1 Keputusan Wali Kota	-	-	1	32.072.800	-	-	-	-	1 Instruksi Walikota	349.999.900		
3.	Akuisisi arsip SKPD yang sudah dibubarkan atau di merger / dihapuskan	Tetap	Melaksanakan pemindahan arsip SKPD yang dibubarkan atau dimerger/dihapus ke LKD	Jumlah	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	2	0		1		1		0		2			
4.	Pendampingan penataan arsip inaktif	Tetap	Mendampingi SKPD dalam proses penataan arsip in aktif	Persen	Persentase pelayanan arsip inaktif kepada SKPD	10	0	0	3	4.800.000	9	14.400.000	8	12.800.000	20	32.000.000		
5.	Peningkatan kompetensi SDM arsiparis	Tetap	SDM Arsiparis	Orang	Jumlah arsiparis yang ditingkatkan kompetensinya		6		0		0		0					

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator		TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
5.	Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan kearsipan (3 kali bimtek dan 1 kali sosialisasi)	Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan kearsipan	Melaksanakan 1 kali bimtek kearsipan dan kearsipan dinamis	Unit Kerja	Jumlah SKPD yang telah mengikuti bimtek dan sosialisasi pengelolaan kearsipan	4 kali (3 kali bimtek dan 1 kali Sosialisasi) diikuti 35 SKPD			35	116.400.000					35	116.400.000		
6.	Terseleenggaranya forum satu data	Tetap		Kegiatan	Forum satu data tingkat daerah		1		0		0		0				Bappedalitbang	Seluruh SKPD
7.	Pembuatan SK Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	Pembuatan SK Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Kelompok Kerja Statistik Sektoral Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Pembuatan SK Tim Statistik Sektoral Daerah dan Kelompok Kerja Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	SK Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Diskominfotik	Seluruh SKPD

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator		TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
8.	Rapat dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tetap	Pelaksanaan rapat yang membahas perkembangan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral daerah	Kegiatan	Jumlah Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4	3	9.900.000	3	9.900.000	3	9.900.000	3	9.900.000	12	39.600.000		
9.	Bimtek Satu Data dan Statistik Sektoral	Bimbingan Teknis mengenai Statistik	Pelaksanaan bimbingan teknis yang diikuti oleh pengelola data dari SKPD dan Kelurahan	Kegiatan	Jumlah Terlaksananya bimbingan teknis mengenai statistik	2	1	3.300.000	1	4.125.000	2	7.425.000	0	0	4	14.850.000		
10.	Pembuatan Dokumen Data	Pembuatan Dokumen Data Statistik Sektoral	Penyusunan dokumen statistik sektoral daerah dan metadata statistik sektoral	Dokumen	Jumlah Pembuatan Dokumen Data	2	0	0	0	0	2	5.202.400	0	0	2	5.202.400		
11.		Updating Portal Satu Data	Kegiatan mengupdate tampilan dan data statistik sektoral di portal satu data	Kegiatan	Jumlah Kegiatan updating portal satu data	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0		
12.		Penghargaan Statistik Sektoral	Pemberian penghargaan statistik sektoral kepada SKPD dan kelurahan di pemerintah kota Banjarmasin	Kegiatan	Jumlah SKPD dan Kelurahan yang data statistik sektoralnya meningkat	0	0	0	0	0	6	20.225.100	0	0	6	20.225.100		
13.		Integrasi Portal Satu Data Kota Banjarmasin dengan Portal Satu Data Indonesia	Mengintegrasikan portal Satu Data Kota Banjarmasin dengan Portal Satu Data Indonesia	Kegiatan	Terintegrasinya portal Satu Data Kota Banjarmasin dengan Portal Satu Data Indonesia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
14.		Pelatihan Big Data bagi ASN Bidang Statistik	Mengirim ASN Bidang Statistik untuk mengikuti pelatihan Big Data	orang	Jumlah ASN yang dapat memanfaatkan big data untuk kegiatan statistik	0	0	0	0	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000			

SS1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
S9 Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset
Kegiatan Utama : 1. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.	Melaksanakan Sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku Pengadaan	Tetap		Kali	Jumlah sosialisasi PBJ		0		1		1		0		2	25.006.800	Bagian PBJ Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
2.	Melakukan Pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan teknis kepada SDM PBJ	Tetap		Orang	Jumlah SDM PBJ yang dididik dan dilatih		0		8		7		0		15	124.000.000		
3.		Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ		buah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ		1								1	550.000		
4.	Pemenuhan data dukung pada 9 variabel tingkat	Tetap		Jumlah	Jumlah variabel tingkat kematangan UKPEJ		1		0		0		0		1			

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	kematangan UKPEJ																	
5.	Peningkatan Pengetahuan SDM dalam penyusunan laporan Keuangan	Tetap	Melakukan pembinaan akuntansi pelaporan terhadap seluruh Penyusun Laporan Keuangan SKPD dan BLUD, serta SDM Bidang Akuntansi bekerjasama dengan pihak akademisi	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilakukan		0		0		0		1		1	192.000.000	BPKPAD	Seluruh SKPD
6.	Pengimplementasian Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan	Tetap	Menggunakan Aplikasi SIPD RI Penatausahaan Keuangan Pengeluaran & Penerimaan Sesuai Alur yang disusun Oleh Kementrian Dalam Negeri	Aplikasi	Jumlah modul aplikasi yang dimanfaatkan dalam penatausahaan keuangan		1		0		0		0		1	-		
7.	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan dalam Implementasi Aplikasi SIPD-RI	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan dalam Implementasi Aplikasi SIPD-RI	Melaksanakan Bimtek dengan sasaran operator SIPD-RI di semua SKPD terkait Penatausahaan keuangan, akuntansi dan Laporan Keuangan	Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan		1	Rp. 11.300.000					1	Rp. 158.800.000	2	Rp. 170.100.000		

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
8.	Pengimplementasian aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan	Tetap	Menggunakan Aplikasi SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024	Aplikasi	Modul aplikasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan laporan keuangan		1	Rp.19.250.000	0		0		0		1	Rp.19.250.000		
9.	Rekonsiliasi data Laporan Keuangan SKPD	Tetap	Mengadakan rekonsiliasi laporan keuangan dengan penyusun laporan keuangan SKPD per triwulan dengan dokumentasi Berita Acara Rekonsiliasi	Kegiatan	Jumlah Kegiatan		1		1		1		1		4	65.340.000		
10.	Melaksanakan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tetap	Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI	Laporan	Jumlah Laporan		0		1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	3,00	40.500.000	Inspektorat	Inspektoral

SS2. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional

S1 Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional

Kegiatan Utama : Penataan Jabatan Fungsional

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.	Peningkatan kompetensi JF melalui Diklat Fungsional maupun Teknis	Tetap	Mengadakan Diklat/Bimtek	Persen	Persentase JF yang mengikuti pelatihan		30%		10%		5%		5%			BKD, Diklat	Seluruh SKPD	

SS2. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional

S2 Terselenggaranya manajemen talenta Aparatur Sipil Negara yang efektif dan efisien

Kegiatan Utama : Penguatan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.	Pelaksanaan asesmen potensi/kompetensi PNS dalam rangka penyusunan profil ASN	Tetap	Asemen kepada semua ASN	Orang	Jumlah PNS yang mengikuti asesmen potensi/kompetensi		0		0		0		800			BKD Dilat		
2.	Membangun sistem informasi yang memuat profil ASN dan Talent Pool (9 kotak talenta)	Tetap		Aplikasi/program	Sistem Informasi Manajemen Talenta		0		0		0		1					

SS2. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
 S6 Terwujudnya sistem kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang adil, layak, dan berbasis kinerja
 Kegiatan Utama : Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1.	Melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Tetap		Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi		2		4		4		2			BKD Diklat		
2.	Melaksanakan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Tetap		Orang	Jumlah ASN tugas belajar		0		25		20		0					
3.	Melaksanakan pengelolaan Diklat	Tetap		Persen	Persentase peserta Diklat yang lulus		10%		40%		35%		15%					
4.	Melaksanakan penyusunan dan asistensi penilaian kinerja	Tetap		Dokumen	Jumlah dokumen penyusunan dan asistensi penilaian kinerja ASN		0		0		0		1					
5.	Melaksanakan Rapat MPPHDP, monitoring dan sosialisasi	Tetap		Kali	Jumlah monitoring, jumlah Rapat MPPHDP, jumlah sosialisasi		3		6		6		4					
6.	Melaksanakan mediasi proses izin perceraian pegawai	Tetap		Kali	Jumlah penyelesaian izin cerai		1		1		1		2					

SS2. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
S7 Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara
Kegiatan Utama : Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana	
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1.	Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan ASN	Tetap		Kali	Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN yang sudah ditetapkan PPK		1		1		0		0			BKD Diklat			
2.	Melaksanakan Pengadaan ASN	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif		0		0		1		1						
3.	Melaksanakan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS		0		0		0		0						
4.	Melaksanakan Pengembangan Karier ASN	Tetap		Dokumen / Perwali	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT, JA dan JF		0		0		0		1						
5.	Menyusun profil pegawai	Tetap		Orang	Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi		150		100		132		0						
6.	Menyusun rencana suksesi berdasarkan pola karier	Tetap		Kali	Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi		0		0		0		1						

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
7.	Menganalisa kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk JPT dan JA	Tetap		Kali	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai		0		1		0		1			BKD Diklat		
8.	Menganalisa kesenjangan kinerja	Tetap		Kali	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja		0		0		0		1					
9.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN tahun 2023-2027 (rencana 5 tahunan)	Tetap		Dokumen	Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN		0		0		0		0					
10.	Menyusun analisa kebutuhan diklat untuk memenuhi kewajiban 20 JP per tahun	Tetap		Kali	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat tahunan dalam upaya pemenuhan kewajiban 20 jp per tahun		0		0		1		0					
11.	Melaksanakan pelatihan coaching dan mentoring bagi pejabat Administrator, Pengawas, JFT dan Pelaksana senior	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring		0		0		1		0			BKD Diklat		
12.	Melaksanakan tes PNS Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan tes PNS Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin		1		0		1		0					

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
13.	Melaksanakan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi secara terbuka dan kompetitif	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan pelantikan dalam rangka pengisian JPT, Jabatan Administrasi		2		1		1		2					
14.	Menyusun kontrak kinerja untuk seluruh pegawai	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penyusunan kinerja pegawai		2		1		1		1					
15.	Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja dan tercapainya kontrak kinerja	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja dan tercapainya kontrak kinerja		1		1		1		1					
16.	Menyusun Peraturan Walikota tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Tetap		Kali	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja		1		0		0		0					
17.	Melaksanakan penegakan disiplin ASN	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan disiplin ASN		3		3		3		3			BKD Diklat		
18.	Melaksanakan tes bebas narkoba untuk ASN	Tetap		Kali	Jumlah pelaksanaan tes bebas narkoba untuk ASN		0		2		2		2					

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Satuan	Indikator		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
19.	Melaksanakan pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	Tetap		Kali	Ketersediaan data yang mutakhir terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai		1		1		1		1					
20.	Menyediakan fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi	Tetap		Kali	updating data pelayanan Kepegawaian yang mukhtahir		1		1		1		1					
21.	Melaksanakan internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Tetap		kali	Jumlah Pelaksanaan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK		0		0		0		1		1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD	
22.		Menetapkan kebijakan terkait internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	Melakukan revisi terkait Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memasukan terkait core values BerAKHLAK	Dokumen	Jumlah Kebijakan tentang internalisasi core values BerAKHLAK	n.a	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD	

ia

a

si
si

ga
u
ro

ta
in

g
s
an

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							TW. I		TW. II		TW. III		TW. IV				Koordinator	Pelaksana
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
23.		Melakukan Surey Core Values ASN Ber AKHLAK di Internal Pemerintah Kota Banjarmasin	melakukan survey internal kepada ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin	Kali	Jumlah pelaksanaan survey internal	n.a	0	0	0	0	1	0	0	0	1		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
24.	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja pelayanan publik			Kali	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja pelayanan publik		1		1		0		0		2		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
25.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik			Kali	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik		0		1		1		1		3			
26.	Melaksanakan sosialisasi kinerja pelayanan publik			Kali	Melaksanakan sosialisasi kinerja pelayanan publik		1		0		0		0		1			
27.	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan asistensi dalam rangka evaluasi nilai kepatuhan SKPD			Kali	Jumlah Rapat Koordinasi dan asistensi dalam rangka evaluasi nilai kepatuhan SKPD		0		7		0		0		7		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
28.	Melaksanakan coaching clinic handling complaint bagi petugas pengelola pengaduan pada SKPD			Kali	Jumlah coaching clinic handling complaint bagi petugas pengelola pengaduan pada SKPD		0		2		0		0		2		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
29.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai persiapan penilaian kepatuhan			Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi sebagai persiapan penilaian kepatuhan		0		7		0		0		7			

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			Total target Tahunan	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
Investasi daerah	an Potensi Investasi Daerah	diupdate dan tersedia di website DPM PTSP dan Pemerintah Daerah					SDM	Jumlah SDM Kompeten yang melaksanakan pemetaan peta potensi investasi daerah	0		0		0		3		0		Terkait	DPMPTSP	Tenaga Ahli (akademisi)	
		Persepsi investor yang berkomitmen untuk melakukan investasi	6%	3	3	4	Jumlah	Form profil Minat Penanaman Modal	0		0		2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	tidak terkait	DPMPTSP	Pihak Ketiga dan Pelaku usaha mikro	
	Meningkatnya investasi daerah	1.154 Trilyun	1.154 Trilyun	1.935 Trilyun	2.204 Trilyun	Penyusunan perda insentif penanaman modal	Jumlah perda	jumlah tersusunnya perda insentif penanaman modal	0		0		0		1		1		Terkait	DPRD Kota Banjarmasin	DPRD Kota Banjarmasin	
		Meningkatnya Realisasi investasi daerah	1.154 Trilyun	1.154 Trilyun	1.935 Trilyun	2.204 Trilyun	Kegiatan	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi [pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	4	58.950.000	1	24.925.000	3	22.350.000	4	30.409.000	12	136.634.000	Terkait	DPMPTSP	SKPD Teknis/pemegang hak akses turunan dan pelaku Usaha	

No.	Rencana Aksi 2023	Rencana Aksi 2024	Definisi Operasional Pelaksanaan Rencana Aksi	Output		Realisasi Tahun 2023 Per Nov	Target Penyelesaian 2024								Target Akhir Tahun 2024	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				Satuan	Indikator		TW. I	Rp.	TW. II	Rp.	TW. III	Rp.	TW. IV	Rp.			Koordinator	Pelaksana
30.	Melaksanakan Workshop Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pemberi layanan pada SKPD			Kali	Jumlah Workshop Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pemberi layanan pada SKPD		0		0		2		0		2		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
31.	Melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik (public hearing) standar pelayanan			Kali	Jumlah kegiatan forum konsultasi publik (public hearing) standar pelayanan		0		1		1		0		2			
32.	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja SKM			Kali	Melaksanakan Rapat Koordinasi kinerja SKM		1		1		1		1		4			
33.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKM			Kali	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKM		0		1		0		1		2		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD
34.	Melaksanakan sosialisasi kinerja SKM			Kali	Melaksanakan sosialisasi kinerja SKM		1		0		0		0		1			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 94 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

PEMUKHTAHIRAN TARGET SASARAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator	Realiasi Tahun 2022	RPJMD/Renstra		Target Road Map			
				2023	2024	2023		2024	
				Target	Target	Target	Realisasi	Target Awal	Perubahan Target
1.	Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	4.74%	4.35%	4.32%	4.35%	4,63%	4.32%	Tetap
2.	Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	3.87	2.00	2.00	2.00	- 9,50	2.00	Tetap
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)	Stunting	22,4	21,35	17,22	21,35	26,50	17,22	Tetap
4.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN)	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	90%		100%	Tetap
5.	Inflasi	Tingkat Inflasi	6.79	3.00-4.00	3.00-4.00	3.00-4.00	2,28	3.00-4.00	2,5 +- 1 %

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

PEMUKHTAHIRAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

1. Reformasi Birokrasi Tematik Inflasi

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024										Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Total target Tahunan	Jumlah Anggaran		Koordinator	Pelaksana
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
Belum optimalnya kualitas Data Harga Bahan Pokok (BAPOK) dan Barang Penting	menjaga Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Tahunan Ke Tahunan	2 - 4 %	2 - 4 %	2,28 %	2,5 +/- 1 %	Melakukan pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting ke 15 pasar	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	6 Laporan	Rp. 17.606.000	6 Laporan	Rp. 17.606.000	6 Laporan	Rp. 17.606.000	6 Laporan	Rp. 17.606.000	24 Laporan	Rp. 70.424.000	Terkait	Disperdagin	Disperdagin
							Pengawasan Pendistribusian LPG Bersubsidi Agen dan Pangkalan	Laporan	Jumlah Laporan Harga Gas LPG 3KG dan Jumlah Pangkalan	10 Kali 30 Pangkalan	Rp. 13.750.000	10 Kali 30 Pangkalan	Rp. 13.750.000	10 Kali 30 Pangkalan	Rp. 13.750.000	10 Kali 30 Pangkalan	Rp. 13.750.000	40 Kali 120 Pangkalan	Rp. 55.000.000	Terkait	Bag. Ekosda	Bag. Ekosda

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			Total target Tahunan	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
						Pemantauan Harga Bahan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN)	Laporan	Kegiatan	1 Kali	Rp. 4.400.000	2 Kali	Rp. 2.200.000	2 Kali	Rp. 4.400.000	2 Kali	Rp. 4.400.000	7 Kali	Rp. 15.400.000	Terkait	Bag. Ekosda	Bag. Ekosda	
						Melaksanakan Pasar Murah dan Bazar	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah dan Bazar	19		7		0		0		26 Kegiatan	408.867.000	Terkait	Disperdagin	Disperdagin	
						Pengembangan Sistem Informasi Harga dan Stok Dedikasi Baiman (EWS) Penyempurnaan Aplikasi dengan menggunakan Geotagging	Kegiatan	Pengembangan Aplikasi							1 Kali Pengembangan Aplikasi Dedikasi Baiman		1 Kali Pengembangan Aplikasi Dedikasi Baiman dengan menggunakan Geotagging	-	Terkait	Disperdagin	Disperdagin	
						Sosialisasi Belanja kepada Masyarakat (Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian Melalui Edukasi Belanja Bijak)	Kegiatan	Jumlah Kegiatan							1 Kali	Rp 4.125.000	2 Kali	Rp. 8.250.000	Terkait	Bag. Ekosda	Bag. Ekosda	
						Melakukan Kerjasama antar Daerah dengan Daerah Penghasil Komoditas Bahan Pokok	Dokumen	Jumlah Kerjasama Antar Daerah	0		1 Kali KAD dengan Kab. Blitar untuk komoditas Telur Ayam Ras				0			-	Tidak terkait	TPID	Disperdagin	
						Pengembangan Kampung Holtikultura, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan pekarangan melalui konsep Pekarangan	Kelompok	Jumlah kelompok yang melaksanakan P2L	5	2.800.000	5	8.400.000	13	8.400.000	13	8.400.000	36	28.000.000	Terkait	DKP3	DKP3	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			Total target Tahunan	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
							Pangan Lestari (P2L)															
Belum tersedianya pergudangan untuk ketahanan pangan	Ketersediaan Bahan Pangan untuk penanggulangan inflasi	Cadangan Pangan					Pemantauan Harga bahan pokok (16 jenis komoditi) di tingkat Grosir, eceran, penggilingan, dan Peternakan (Enumatur Harga Pangan/Petugas Pemantauan Harga)	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok dan Bahan Pangan Lainnya	12 Kali 5 orang petugas	per orang Rp. 100.000 Total Rp. 6.000.000	12 Kali 5 orang petugas	per orang Rp. 100.000 Total Rp. 6.000.000	12 Kali 5 orang petugas	per orang Rp. 100.000 Total Rp. 6.000.000	13 Kali 5 orang petugas	per orang Rp. 100.000 Total Rp. 6.500.000	49 Kali	Rp. 24.500.000	Terkait	DKP3	DKP3
							Melaksanakan Gerakan Pangan Murah	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah	0		2 Kali	Rp 15.000.000	1 Kali	Rp. 17.200.000	3 Kali	Rp. 32.200.000	Terkait	DKP3	DKP3		
							Melaksanakan Penyaluran bantuan Beras CPP	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras CPP	1 Kali 2,5 Ton Beras	Biaya Penyaluran Rp. 1.500.000	1 Kali 2,5 Ton Beras	Biaya Penyaluran Rp. 1.500.000	1 Kali 2,5 Ton Beras	Biaya Penyaluran Rp. 1.500.000	1 Kali 2,5 Ton Beras	Biaya Penyaluran Rp. 1.500.000	4 Kali 10 Ton Beras	Biaya Penyaluran Rp. 6.000.000	Terkait	DKP3	DKP3
Kecenderungan masy. yang belum menerapkan diversifikasi bahan pangan	Pencapaian target konsumsi pangan Perkapita /tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	85,5	85,5	86		Bimbingan Teknis Diversifikasi/ Pengankaragaman Olahan Pangan (Bimbingan Teknis B2SA terhadap PKK Kota Banjarmasin)	Kegiatan	Jumlah peserta bimbingan teknis diversifikasi/ pengankaragaman olahan pangan	-	-	-	-	1 Kali 40 orang kader pangan	Rp 9.247.900	0			Rp 9.247.900	Terkait	DKP3	DKP3
							Lomba Pengankaragaman Olahan Pangan (Bimbingan Teknis B2SA terhadap PKK Kota Banjarmasin)	Kegiatan	Jumlah Peserta Lomba					1 Kali 10 Orang Peserta	Rp. 23.373.000	1 Kali 10 Orang Peserta	Rp. 23.373.000	Terkait	DKP3	DKP3		
							Melaksanakan Gerakan Menanam Bibit Unggul	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Gerakan Menanam	0		1		0		0		0	Terkait	DKP3	DKP3	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			Total target Tahunan	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
										Bibit Unggul												
strategi yang sudah disusun dalam roadmap pengendalian inflasi kota masih belum maksimal di akomodir oleh SKPD pengampu	konsistensi dokumen roadmap pengendalian inflasi kota Banjarmasin dengan DPA SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengendalian inflasi	Rencana Kegiatan yang ditindaklanjuti oleh SKPD				Rapat Koordinasi TPID (High Level Meeting) dan Rapat Koordinasi Bulanan TPID Kota Banjarmasin	Kegiatan	Kegiatan	3	Rp. 8.800.000	3	Rp. 8.800.000	3	Rp. 8.800.000	3	Rp. 8.800.000	12 Kali	Rp. 26.400.000	Tidak Terkait	Bag. Ekosda	Bag. Ekosda	
						Penguatan kelembagaan antar instansi anggota TPID melalui Capacity Building	Kegiatan	Kegiatan			1	Rp 4.125.000	1	Rp 4.125.000						Rp. 8.250.000	Tidak Terkait	Bag. Ekosda

2. Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan

Permasalahan	Sosaran	Indikator	Baseline	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			Total target Tahunan	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
Terbatasnya Kewenangan Penggunaan Dana APBD dalam intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan	Pelibatan Stakeholder di luar pemerintah Kota Banjarmasin / Non Governmental Organization	Jumlah Non Governmental Organization yang terlibat dalam intervensi Penanggulangan Kemiskinan				Menerbitkan instruksi dan surat edaran memungut zakat dan infaq dari ASN kota banjarmasin	Rupiah	Jumlah Anggaran yang di sahurkan untuk pengentasan Kemiskinan	Rp 3.168.750.000	Rp 750.000.000	Rp 3.168.750.000	Rp 750.000.000	Rp 3.168.750.000	Rp 750.000.000	Rp 3.168.750.000	Rp 750.000.000	Rp 12.675.000.000	Rp 3.000.000.000	Pendistribusian kemanusiaan, pendidikan, dakwah advokasi, ekonomi dan kesehatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah	Badan Amil Zakat Nasional	
Ketidaksesuaian data kemiskinan dari pemerintah pusat dengan kondisi dilapangan dan keterpaduan data kemiskinan belum terintegrasi sepenuhnya dengan urusan-urusan lainnya	Membuat database profil kemiskinan internal Kota Banjarmasin	Sistem Informasi terkait Kemiskinan				Pelimpahan Kewenangan updating data warga miskin ke kelurahan	kelurahan	Jumlah operator Kelurahan yang aktif melakukan updating DTKS	-	-	52	46.800.000	52	31.200.000	52		52	78.000.000		Dinas Sosial	Keturahan	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
								Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					Total target Tahunan
				Target	Anggaran	Target				Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
2023	Realisasi 2023	2024	2023	2024	2024											Koordinator	Pelaksana				
							Optimalisasi Peran Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam pelayanan pengurusan Bantuan Sosial	Puskesmas	Jumlah PUSKESOS yang aktif memberikan pelayanan	6	13.000.000	6	19.500.000	6	19.500.000	8	19.500.000	8	71.500.000	Dinas Sosial	
							Memutakhirkan dan melakukan uji publik Standar Pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan pemberian bantuan sosial	Dokumen	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang dimutakhirkan dan dilakukan uji publik	0	0	1	28.200.000	0	0	0	0	1	28.200.000	Dinas Sosial	
Kurang Fasilitas Warga Miskin dalam mendapatkan akses layanan kependudukan	Fasilitasi dan pendampingan bagi warga miskin yang tidak mempunyai administrasi kependudukan	Jumlah warga miskin yang terfasilitasi dokumen administrasi kependudukan	193	167	182	229	Inovasi Rekayasa Jiwa (Perekaman KTP-el untuk Warga yang Sakit, Tua dan Gangguan Jiwa)	orang	Jumlah warga miskin yang memperoleh layanan perekaman KTP-el	12	1.800.000	36	5.400.000	36	5.400.000	3800%	5.700.000	122	18.300.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Penerbitan Akta Kematian bagi warga miskin	dokumen	Jumlah penerbitan akta kematian warga miskin	25	1.800.000	25	2.700.000	25	2.925.000	2500%	2.475.000	100	9.900.000	Pelayanan Terintegrasi Penerbitan Akta Kematian untuk Santunan Kematian bagi warga miskin	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan	Sesaran	Indikator	Tingkat	Target Tahunan		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024																Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat atau stakeholder) / (Tidak)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV				Total target Tahunan	Jumlah Anggaran		Koordinator	Pelaksana
				Target	Realisasi		TARGET	Anggaran	TARGET	Anggaran	TARGET	Anggaran	TARGET	Anggaran	TARGET	Anggaran	TARGET	Anggaran	TARGET	Anggaran							
		Kecapaian waktu layanan	%	100 %	100 %	Meningkatkan Hasil Implementasi Pelayanan Perizinan	Laporan	Laporan monitoring dan evaluasi ketepatan waktu layanan	0		0		0		0		100%		100%		1		Tidak Terkait	DPMP/TSP	SETDA, DPMP/TSP, DISKOMINF O, SKPD TEKNIK TERKAIT PPR, INSPEKTOR AT		
		Survei Persepsi Anti Korupsi	Skor	3,9	3,9	Meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap peyamanan	Skor	Nilai Survey/ persepsi anti korupsi	0		0		4		0		0		4		4		Tidak Terkait	DPMP/TSP	SETDA, DPMP/TSP, DISKOMINF O, SKPD TEKNIK TERKAIT PPR, INSPEKTOR AT		
		Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	90,26 %	90,50 %	Meningkatkan Kecepatan Informasi Laporan Kegiatan Pemananaan Modal	Laporan	Laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat	0		1	5.500.000	0		1	6.875.000	1		2	12.375.000		2		Terkait	DPMP/TSP	SKPD Terkait	
Rendahnya Kepatuhan Laporan Kegiatan Pemananaan LKPM	Meningkatnya Kepatuhan Laporan Kegiatan Pemananaan Modal	Persepsi Penilaian Kepatuhan	%	100 %	100 %	Meningkatkan Kecepatan Informasi Laporan Kegiatan Pemananaan Modal	Laporan	Evaluasi, verifikasi penyampaian LKPM dari Pelaku Usaha Kecil-Mengah	40		0		30		0		50		50		170		0		Tidak Terkait	DPMP/TSP	DPMP/TSP

5. Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri

Permasalahan	Gesaran	Indikator	Target	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan Aksi (terkait dengan maspabodot/ stakeholder internal)	Unit/Batman Kerja Pelaksana							
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I				Triwulan II					Triwulan III				Total target tahunan	Jumlah Anggaran	Koordinasi	Pelaksana
										Tertarget	Anggaran	Tertarget	Anggaran	Tertarget	Anggaran	Tertarget	Anggaran		Tertarget	Anggaran						
SDM PBJ yang kurang Kompeten	Meningkatnya SDM PBJ yang berkompeten	Jumlah SDM PBJ yang meningkatkan kompetensinya	21	21	18	Melakukan Pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis kepada SDM PBJ	Ora ng	Jumlah SDM PBJ yang dididik dan dilatih	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	Tidak terkait	UKPBJ	Pegawai UKPBJ	
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum matang	Meningkatnya Kematangan organisasi UKPBJ	Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3 atau 9 variabel	Level 3 atau 9 variabel	Level 3 atau 9 variabel	Melakukan pemenuhan data dukung pada 9 variabel tingkat kematangan UKPBJ sebagai syarat level 3	Jumlah variabel tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah variabel tingkat kematangan UKPBJ	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	Tidak terkait	UKPBJ	UKPBJ	
Penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa kurang optimal	Meningkatnya Penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	Skor penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	21	21	25	Melaksanakan Sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku Pengadaan	kali	Jumlah sosialisasi PBJ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Pelaku Pengadaan		

Permasalahan	Gejala	Indikator	Target	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan yang diadukung masyarakat / stakeholder (utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			Total target & Tahunan	Jumlah Anggota	Kordinator	Pelaksana
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
Belum meratanya informasi mengenai katalog dan P3DN ke IKM	Meningkatnya pemahaman an pelaku usaha dan akpd terkait P3DN, P3DN ber TKDN dan P3DN non TKDN, mengenai katalog dan P3DN	Jumlah peserta sosialisasi mengenai e-katalog dan P3DN	50	50	100	Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan mengenai e-katalog dan P3DN	Ora ng	Jumlah peserta sosialisasi dan pendampingan mengenai e-katalog dan P3DN	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	Terkait	Disperdag	Disperdag
Maasih rendahnya pemahaman an IKM terkait pemenuhan an persyaratan an dalam sertifikasi TKDN untuk P3DN industri	Meningkatnya pemahaman an persyaratan an dalam sertifikasi TKDN	Jumlah peserta sosialisasi mengenai pemenuhan an persyaratan an dalam sertifikasi TKDN untuk P3DN Industri	50	50	100	Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan mengenai pemenuhan an persyaratan an dalam sertifikasi TKDN untuk P3DN Industri	Ora ng	Jumlah peserta sosialisasi yang memenuhi an persyaratan an dalam sertifikasi TKDN	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	Terkait	Disperdag	Disperdag

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Target Tahunan			Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2024								Jenis Kegiatan Aksi (Terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
				2023	Realisasi 2023	2024		Satuan	Indikator	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			Total target Tahunan	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
ASN yang belum kompeten dalam proses pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan	Jumlah ASN yang bersertifikat PBJ		30 org		40 org	orang	ASN yang dilatih PBJ level 1	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-	Tidak terkait	BKD	BKD Diklat, UKPBJ	
ASN yang belum kompeten dalam proses pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan	Jumlah ASN yang bersertifikat PBJ		10 org		15 org	orang	jumlah ASN yang lulus sertifikasi PBJ level 1	-	-	-	-	15	-	-	-	15	-	Tidak terkait	BKD	BKD Diklat, UKPBJ	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA